

Pengadaan sarana dan prasarana di Sekolah Dasar Islam Surya Buana Malang

Arif Nur Rokhman

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
e-mail: 210106110006@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

pengadaan; pemeliharaan;
manajemen; partisipasi;
efisiensi

Keywords:

procurement; maintenance;
management; participation;
efficiency

ABSTRAK

Pada artikel ini dibahas tentang manajemen pengadaan dan pemeliharaan sarana serta prasarana pendidikan di SD Islam Surya Buana Malang. Pendekatan yang dilakukan mencakup analisis mendalam terhadap kebutuhan sekolah sebelum memulai proses pengadaan, yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mendukung proses pembelajaran. Selain itu, sekolah ini menekankan pemeliharaan berkelanjutan melalui strategi terencana untuk memastikan semua fasilitas tetap berfungsi optimal. Partisipasi aktif dari komunitas sekolah dalam

pemeliharaan juga menjadi fokus, dengan melibatkan semua stakeholder untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pengelolaan fasilitas.

ABSTRACT

This article discusses the management of procurement and maintenance of educational facilities at SD Islam Surya Buana Malang. The approach includes in-depth analysis of school needs prior to procurement processes, aimed at optimizing resource utilization and supporting the learning process. Additionally, the school emphasizes sustainable maintenance through planned strategies to ensure all facilities function optimally. Active participation of the school community in maintenance is a key focus, involving all stakeholders to enhance facility management efficiency and quality.

Pendahuluan

Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk mental, spiritual, dan intelektualitas generasi bangsa yang utuh serta berakhlak mulia. Untuk mencetak generasi yang unggul dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan, kualitas pendidikan menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan. Salah satu cara untuk mencapai kualitas pendidikan yang tinggi adalah dengan mengelola sarana dan prasarana secara baik, sehingga pelayanan pendidikan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Lembaga pendidikan merupakan jenis organisasi non-profit yang tidak bertujuan untuk meraih keuntungan komersial. Di dalam lembaga ini, terdapat aktivitas pelayanan kepada konsumen seperti siswa, mahasiswa, dan masyarakat umum yang dikenal sebagai pemangku kepentingan atau stakeholder. Pada dasarnya, lembaga pendidikan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

bertujuan untuk memberikan layanan yang memuaskan, karena para penerima layanan ini telah membayar biaya yang cukup tinggi kepada lembaga tersebut.

Setiap lembaga pendidikan diwajibkan memiliki sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005. Sarana yang diperlukan mencakup perabotan, peralatan pendidikan, media pembelajaran, buku, sumber belajar lainnya, serta perlengkapan habis pakai. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menciptakan kondisi yang memadai sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan teratur.

Setiap lembaga pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi berbagai fasilitas seperti lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, area olahraga, ruang ibadah, serta ruang untuk kegiatan bermain dan berkreasi. Tujuannya adalah untuk mendukung pelaksanaan beragam kegiatan pembelajaran yang komprehensif, sesuai dengan kebutuhan dan standar yang telah ditetapkan.

Pembahasan

Pengertian Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pengadaan sarana dan prasarana mencakup segala aktivitas yang diperlukan untuk menyediakan barang, benda, dan jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas. Secara etimologis, pengadaan prasarana merujuk pada peralatan tidak langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan.

Untuk memastikan pengadaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan, diperlukan alokasi dana yang memadai serta komunikasi yang cepat dan akurat mengenai kebutuhan peralatan. Ini akan memungkinkan penyusunan perencanaan yang komprehensif.

Secara ringkas, tujuan dari pengadaan ini sesuai dengan yang dinyatakan dalam Keputusan Presiden Nomor 08 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yaitu: "Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan yang dibiayai oleh APBN/APBD untuk menyediakan barang/jasa, baik yang dilakukan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa" (Gunawan, 2011).

Tujuan Pengadaan Sarana dan Prasarana

Langkah awal dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah proses pengadaan sarana dan prasarana tersebut. Pengadaan perlengkapan pendidikan umumnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan perkembangan pendidikan di sekolah, menggantikan barang-barang yang rusak, hilang, dihapuskan, atau karena alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memerlukan penggantian. Selain itu, pengadaan juga bertujuan untuk menjaga tingkat persediaan barang setiap tahun dan anggaran mendatang. Oleh karena itu, perencanaan pengadaan perlengkapan pendidikan harus dilakukan dengan teliti agar selalu sesuai dengan kebutuhan sekolah (Ellong, 2018).

Secara keseluruhan, tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah untuk memberikan layanan profesional dalam bidang tersebut guna mendukung terselenggaranya proses pendidikan yang efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan ini, beberapa langkah perlu dilakukan. Pertama, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan harus terencana dengan sistem yang teliti dan cermat. Dengan manajemen yang baik, diharapkan semua perlengkapan yang diperoleh oleh sekolah merupakan sarana dan prasarana berkualitas tinggi yang sesuai dengan kebutuhan sekolah serta diperoleh dengan penggunaan dana yang efisien.

Selanjutnya, penting untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana dimanfaatkan dengan tepat dan efisien. Pemanfaatan yang optimal akan membantu kelancaran proses pendidikan. Selain itu, perawatan sarana dan prasarana sekolah harus rutin dilakukan agar selalu siap digunakan oleh semua personel sekolah. Dengan sarana dan prasarana yang terjaga dengan baik, kegiatan belajar mengajar dapat berjalan lancar sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan dapat tercapai.

Langkah-Langkah Pengadaan Sarana dan Prasarana

Berdasarkan informasi dari beberapa sumber, langkah-langkah dalam pengadaan sarana dan prasarana menurut LLDIKTI (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah) dapat dijelaskan sebagai berikut (LLDIKTI, 2021):

- 1) Perencanaan kebutuhan SARPRAS melibatkan evaluasi kebutuhan dan tujuan untuk menentukan dengan tepat apa yang dibutuhkan dalam hal sarana dan prasarana. Ini mencakup penetapan tingkat prioritas untuk pengadaan SARPRAS dan pembuatan estimasi anggaran atau biaya yang diperlukan.
- 2) Seleksi vendor atau metode pemerolehan SARPRAS dilakukan untuk menentukan cara memperoleh SARPRAS, baik melalui pembelian, produksi internal, menerima bantuan, penyewaan, atau pengadaan melalui lelang.
- 3) Penyusunan dokumen pengadaan mencakup penyiapan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses pengadaan, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), spesifikasi teknis, dan lainnya.
- 4) Pelaksanaan pengadaan SARPRAS dilakukan sesuai dengan metode atau cara yang telah dipilih.
- 5) Penerimaan barang dilakukan dengan memeriksa secara cermat barang yang telah diterima untuk memastikan bahwa barang tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis dan mencapai standar kualitas yang diharapkan.
- 6) Pengendalian dan pemeliharaan SARPRAS melibatkan pemeliharaan rutin dan pengendalian SARPRAS agar selalu dalam kondisi siap pakai dan berfungsi dengan baik.

Dalam proses pengadaan SARPRAS, penting untuk menjalankannya dengan perencanaan yang matang, ketelitian, dan kewaspadaan untuk memastikan bahwa segala kebutuhan terpenuhi sesuai dengan rencana.

Cara-Cara Pengadaan Sarana dan Prasarana

Perencanaan pengadaan barang sangat krusial untuk memastikan bahwa sekolah mendapatkan barang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah (Mukrimaa et al., 2016). Pembelian adalah metode untuk memperoleh sarana dan prasarana pendidikan dengan membayar sejumlah uang kepada penjual sesuai kesepakatan, yang melibatkan pertukaran barang dengan uang. Ketika lembaga pemerintah terlibat dalam transaksi semacam ini, baik menggunakan anggaran APBN maupun APBD, prosesnya diatur oleh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.

Selanjutnya, produksi internal adalah cara untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan melakukan proses produksi oleh pihak sekolah sendiri, sering kali melibatkan guru, siswa, atau staf sekolah. Pilihan ini harus dipertimbangkan dengan cermat untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dibandingkan dengan metode pengadaan lainnya. Keuntungan utama dari melakukan produksi sendiri barang yang dibutuhkan adalah kontrol penuh terhadap kualitas barang yang dihasilkan, sehingga sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh sekolah.

Ada beberapa metode lain yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Salah satunya adalah menerima hibah atau bantuan, di mana sekolah memperoleh barang atau dana secara cuma-cuma dari pihak lain, baik itu pemerintah (pusat atau daerah) maupun entitas swasta. Proses penerimaan hibah ini umumnya melibatkan pengumuman program secara terbuka kepada sekolah-sekolah, dengan mencantumkan syarat, prosedur, serta tahapan pelaksanaannya. Sekolah yang berminat harus menyusun proposal dan mengirimkannya untuk dipertimbangkan dalam seleksi kompetitif.

Selain itu, metode lain adalah penyewaan, di mana sekolah menyewa barang dari pihak lain dengan pembayaran sesuai perjanjian sewa. Metode ini cocok digunakan untuk kebutuhan fasilitas yang bersifat sementara. Peminjaman juga merupakan opsi lain, di mana sekolah dapat menggunakan barang secara sementara tanpa biaya dari pihak lain berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam. Ini sesuai untuk kebutuhan fasilitas yang sifatnya sementara dan temporer, dengan mempertimbangkan reputasi sekolah dalam proses ini.

Selanjutnya, daur ulang merupakan cara lain untuk memperoleh sarana dan prasarana pendidikan dengan mengambil barang yang sudah tidak digunakan lagi dan mengubahnya menjadi barang yang dapat digunakan kembali. Sebelum proses daur ulang dilakukan, sekolah harus memastikan barang tersebut dihapuskan sesuai aturan yang berlaku. Penukaran adalah metode lain yang memungkinkan sekolah menukar fasilitas yang dimiliki dengan yang dibutuhkan oleh organisasi atau instansi lain. Pertukaran ini harus menguntungkan kedua belah pihak, dengan melakukan evaluasi nilai ekonomis barang yang akan ditukar.

Terakhir, perbaikan atau rekondisi adalah cara untuk memperbaiki fasilitas yang rusak, baik dengan memperbaiki unit yang rusak maupun menggantikan bagian yang

tidak berfungsi lagi dengan yang baru, sehingga fasilitas tersebut dapat digunakan kembali sesuai dengan tujuannya.

Prosedur Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pengadaan barang dan jasa di sekolah harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007. Secara umum, proses pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah melibatkan beberapa tahapan yang terstruktur. Langkah pertama adalah melakukan analisis untuk menentukan kebutuhan dan fungsi dari sarana dan prasarana yang diperlukan. Selanjutnya, barang-barang tersebut dikelompokkan berdasarkan klasifikasi yang sesuai.

Kemudian, sekolah mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana kepada pemerintah untuk sekolah negeri atau kepada yayasan untuk sekolah swasta. Proposal ini akan melewati proses peninjauan dan evaluasi oleh pihak yang berwenang untuk menilai kelayakannya. Setelah mendapatkan persetujuan, sarana dan prasarana akan disampaikan ke sekolah yang mengajukan permohonan.

Contoh proses pengadaan sarana dan prasarana di sekolah dimulai dengan melakukan analisis kebutuhan, mengklasifikasikan barang yang dibutuhkan, dan mengajukan proposal ke pemerintah melalui Dinas Pendidikan Tingkat II. Setelah proposal disetujui, akan dilakukan peninjauan dan evaluasi untuk menilai kelayakannya. Setelah disetujui, barang biasanya akan dikirim langsung ke sekolah oleh instansi terkait.

Proses pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dapat bervariasi tergantung pada jenis barang yang dibutuhkan. Jenis sarana dan prasarana pendidikan dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok, seperti buku, alat, bangunan, dan tanah. Contohnya, untuk pengadaan buku, salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kebudayaan dan mendukung pendidikan dengan menyediakan bahan bacaan seperti buku, majalah, atau materi pustaka lainnya.

Pengadaan alat meliputi alat kantor seperti mesin tulis, mesin hitung, komputer, dan alat pembersih, serta alat pendidikan seperti alat peraga, alat laboratorium, alat seni, dan alat olahraga. Metode pengadaannya bisa melalui pembelian, produksi sendiri, atau menerima bantuan, hibah, atau hadiah. Perabot termasuk meja, kursi, lemari, rak, dan filing kabinet, yang digunakan untuk menulis, istirahat, atau menyimpan barang. Pengadaan perabot dapat dilakukan dengan membeli, membuat sendiri, atau menerima hibah.

Pengadaan bangunan milik negara termasuk dalam pengadaan sarana prasarana pendidikan, dengan prosedur yang mirip dengan pengadaan barang lainnya. Ini bisa melibatkan pembangunan baru, penyewaan, hibah, atau pertukaran bangunan yang sudah ada sesuai kebutuhan.

Pengadaan tanah oleh pemerintah bisa melibatkan tanah yang dimiliki negara atau yang dikuasai oleh pihak lain. Prosedur untuk tanah negara melibatkan permintaan hak pakai atau pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk tanah yang dikuasai pihak lain, prosedur seperti pembelian, pelepasan hak tanah, atau pertukaran tanah harus diikuti terlebih dahulu.

Pengadaan Sarana dan Prasarana SDI Surya Buana

SD Islam Surya Buana Malang menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengelola pengadaan dan pemeliharaan sarana serta prasarana sekolah. Langkah pertama yang mereka ambil adalah melakukan analisis kebutuhan secara mendalam sebelum memulai proses pengadaan. Dengan pendekatan ini, sekolah dapat mengidentifikasi dengan jelas kebutuhan siswa dan staf, menghindari pemborosan sumber daya, dan memastikan bahwa setiap pengadaan mendukung secara langsung proses pendidikan yang berlangsung. Analisis kebutuhan ini tidak hanya didasarkan pada intuisi, tetapi juga data konkret, memperlihatkan kedewasaan dalam pengambilan keputusan manajerial.

Selain pengadaan, SD Islam Surya Buana Malang juga menekankan pemeliharaan berkelanjutan terhadap fasilitas sekolah. Mereka mengadopsi strategi pemeliharaan terencana untuk memastikan agar setiap fasilitas tetap dalam kondisi baik dan berfungsi optimal. Pendekatan ini mencakup pemantauan rutin oleh berbagai bidang tanggung jawab, seperti Tata Usaha, wali kelas, dan bidang-bidang lainnya yang memiliki peran krusial dalam menjaga infrastruktur sekolah.

Sekolah ini tidak hanya menangani pengadaan dan pemeliharaan secara umum, tetapi juga membedakan pendekatannya untuk setiap jenis fasilitas. Misalnya, mereka mengalokasikan dana khusus untuk perpustakaan, fasilitas olahraga, laboratorium sains, dan ruang kelas, dengan fokus pada perawatan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing fasilitas. Namun, mereka menghadapi tantangan terkait dengan pengadaan teknologi, seperti LCD, yang hanya bisa dilakukan satu unit per-tahun, menunjukkan perlunya evaluasi ulang terhadap kebijakan pengadaan agar lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi pendidikan.

Partisipasi aktif dari seluruh komunitas sekolah dalam proses pemeliharaan juga menjadi ciri khas dari pendekatan manajemen SD Islam Surya Buana Malang. Dengan melibatkan guru, staf administrasi, siswa, dan bahkan orang tua siswa, sekolah ini memastikan bahwa setiap anggota komunitas terlibat dalam menjaga dan meningkatkan kualitas fasilitas sekolah. Meskipun demikian, masih ada ruang untuk perbaikan, seperti meningkatkan keproaktifan dalam pemeliharaan dan memperdalam analisis kebutuhan fasilitas tertentu untuk meningkatkan efisiensi dan responsibilitas secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, inisiatif yang diambil oleh SD Islam Surya Buana Malang mencerminkan dedikasi mereka terhadap efisiensi operasional, pemenuhan kebutuhan pendidikan yang tepat, dan perawatan yang berkelanjutan terhadap sarana dan prasarana sekolah. Langkah-langkah ini tidak hanya mendukung pembelajaran yang berkualitas, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inspiratif bagi seluruh komunitas sekolah.

Kesimpulan dan Saran

Artikel ini menggambarkan pentingnya manajemen yang efektif dalam pengadaan dan pemeliharaan sarana serta prasarana pendidikan di SD Islam Surya Buana Malang. Pendekatan yang terstruktur dan terencana dalam mengelola kebutuhan sekolah, baik

sebelum memulai proses pengadaan maupun selama tahap pemeliharaan, telah terbukti mendukung efisiensi penggunaan sumber daya dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Aktivitas ini juga menonjolkan peran penting partisipasi aktif dari seluruh komunitas sekolah, termasuk guru, staf, siswa, dan orang tua, dalam menjaga dan meningkatkan kondisi fasilitas. Meskipun demikian, tantangan seperti keterbatasan dalam pengadaan teknologi menunjukkan perlunya evaluasi kebijakan agar lebih responsif terhadap perkembangan pendidikan. Dengan demikian, upaya yang dilakukan oleh SD Islam Surya Buana Malang tidak hanya mendukung proses pendidikan yang optimal, tetapi juga membangun fondasi yang kuat bagi pertumbuhan dan keberlanjutan sekolah ke depannya.

Daftar Pustaka

- Ellong, T. A. (2018). Manajemen sarana dan prasarana di lembaga pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 11(1). <https://doi.org/10.30984/jii.v11i1.574>
- Gunawan, A. H. (2011). Administrasi sekolah: Administrasi pendidikan mikro. Indonesia, Pemerintah Pusat. (2003). Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- LLDIKTI. (2021). Pengadaan, penyaluran, dan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*.
- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., Citra, A. Y., Schulz, N. D., Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2016). Manajemen sarana dan prasarana pendidikan. In *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(8).